

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum surat perintah kerja (SPK) dengan adanya perjanjian pengadaan barang publik yang merupakan bagian dari kontrak itu sendiri. Artinya, bahwa SPK merupakan kontrak yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan oleh para pihak layaknya suatu undang-undang. Namun SPK dikeluarkan oleh pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk itu sebagai wakil dari negara, disamping dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan keuangan negara. Berkaitan dengan itu, maka kedudukan hukum dari SPK, sama saja dengan kontrak itu sendiri. Sebenarnya dengan diadakan perjanjian pengadaan antara pejabat publik dengan pihak lainnya, maka hal ini dapat dikatakan tunduk kepada hukum perdata pada satu sisi, namun pada sisi lainnya berlaku juga hukum administrasi negara.
2. Hubungan kontraktual antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyediaan barang/jasa untuk pengadaan barang publik pada Dinas Pendidikan Kota Padang, pada dasarnya berhubungan hukum sebagaimana dimaksudkan lahir dari adanya suatu perjanjian pengadaan yang diawali dari proses yang telah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan yang mengikuti ketentuan hukum administrasi negara berupa Surat Perintah Kerja (SPK). SPK tersebut merupakan lanjutan dari adanya perjanjian para pihak yang sifatnya standar karena formatnya telah

ditentukan melalui mekanisme ketentuan yang ada. Berkaitan dengan hubungan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi kontrak termasuk SPK tersebut.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dijadikan saran, antara lain :

1. Agar pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kota Padang diharapkan terus menerus meningkatkan pelaksanaan ketentuan yang berlaku untuk lebih baik lagi dalam menciptakan pemerintah yang baik dan bersih dari unsur-unsur KKN.
2. Diharapkan juga pihak legislatif mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, diharapkan tidak ada terjadi intervensi yang mengakibatkan deskriminatif dan dimungkinkan terjadinya ketidakadilan serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.

